

MANAJEMEN PENGARSIPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVISI JAWA TIMUR

Faiz Dzikri Ezza Mahendra

Program Studi Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya

email: rgktfaiz@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 22, 2024

Revised Juni 20, 2024

Accepted Jun 28, 2024

Keywords:

Legal documentation,
Information network,
East Java Provincial KPU

ABSTRACT

The management of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) of the East Java Provincial KPU began in July 2023, marked by the formation of a team based on the decision of the East Java Provincial KPU Number: 18/HK.03.1-Kpt/Prov/30/07/2023 concerning the composition of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) team in the Bengkulu Provincial KPU. The Legal Documentation and Information Network is a decision on the management of legal documentation and information on technical guidelines for managing legal documentation and information within the KPU (Regency/City) to date, the number of legal products that have been uploaded to the JDIH of the East Java Provincial KPU from 2013 to 2021 is 191. The system used in the subsection of technical implementation of elections, participation, public relations and human resources has been well-programmed. On the JDIH website of the East Java Provincial KPU, there are KPU regulations, decisions which include (Provincial KPU decisions and Regency/City KPU decisions). The data collection technique in this journal is obtained from literature and participatory activities in the East Java Provincial KPU office. The results obtained from this activity can determine the comparison of the number of viewers and the number of PKPU that have been established.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Faiz Dzikri Ezza Mahendra
Program Studi Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya
Surabaya
email: rgktfaiz@gmail.com

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, adil, dan berintegritas. Salah satu tugas pokok KPU adalah menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk itu, KPU Provinsi Jawa Timur memiliki layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

JDIH merupakan singkatan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum, keputusan tentang pengolahan dokumentasi dan informasi hukum 2022 menjelaskan tentang pedoman teknis pengolahan dokumentasi informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten/Kota).

Dasar hukum keputusan komisi ini adalah : pkpu no.8 tahun 2019 sebagai mana telah diubah terakhir dengan pkpu no 4 tahun 2021; pkpu no 14 tahun 2020; kpt KPU no 134 tahun 2016, kpt KPU no 533 tahun 2020. Dalam keputusan komisi ini diatur dengan pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan hukum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan ruang lingkupnya meliputi dokumen produk hukum JDIH KPU, organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU, standar pengelolaan JDIH KPU, pedoman pengelolaan JDIH, pedoman pengelolaan media sosial, monitoring evaluasi dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dengan pemberian penghargaan pengelolaan JDIH.

JDIH KPU Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk menyediakan informasi hukum terkait Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat. Informasi hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada.

Manajemen pengarsipan yang efektif dan efisien merupakan hal yang penting bagi JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. Pengarsipan yang baik akan membantu JDIH dalam menyimpan, memelihara, dan mengelola dokumen-dokumen penting terkait Pemilu dan Pilkada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan oleh JDIH selalu akurat dan terkini.

METODE PENELITIAN

Manajemen Pengarsipan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur". Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana proses dari Manajemen Pengarsipan JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. Data penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini diperoleh dari tinjauan pustaka dan sumber resmi dari Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil yang didapatkan bahwa dalam situs website JDIH terdapat peraturan- peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum,

No	Tahun	Jumlah Keputusan	Masih Berlaku	Tidak Berlaku	Abstrak	
					ada	Tidak
1.	1999	1	-	1	-	1
2.	2004	2	-	2	2	-
3.	2005	4	-	4	4	-
4.	2008	4	-	4	4	-
5.	2009	4	-	4	4	-
6.	2010	2	-	2	2	-
7.	2013	2	-	2	2	-
8.	2015	16	-	16	16	-
9.	2016	1	-	1	1	-
10.	2017	1	-	1	1	-
11.	2018	12	-	12	12	-
12.	2019	15	-	3	15	-
13.	2020	15	14	1	15	-
14.	2021	5	5	-	15	-
	Jumlah	84	19	49	93	1

Gambar 1. Data Pemilu

Sumber: JDIH (Diolah oleh penulis, 2024)

Dimana didalam website ini terdapat jumlah jumlah produk hukum KPU Provinsi Jawa Timur yang telah diupload melalui JDIH sebanyak pada tahun 1999 jumlah keputusan yang disahkan sebanyak 1 sedangkan jumlah yang tidak berlaku berjumlah 1 yang memiliki Abstrak sebanyak 0 dan tidak memiliki sebanyak 1,pada tahun 2004 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 2 yang berlaku dan tidak berlaku sebanyak 2 memiliki Abstrak 2 dan tidak 0,pada tahun 2005 jumlah yang disahkan sebanyak 4 dan tidak berlaku sebanyak 4 Abstrak yang berlaku sebanyak 4 sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 0,pada tahun 2008 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 4 dan yang tidak berlaku berjumlah 4 sedangkan Abstrak yang berlaku berjumlah 4,dan yang tidak berlaku berjumlah 0, pada tahun 2009 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 4,yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 4, dan jumlah abstrak yang ada sebanyak 4, sedangkan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2010 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 2 ,yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 2, abstrak yang ada sebanyak 2 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2013 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 2, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 2, abstrak yang ada sebanyak 2 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0,pada tahun 2015 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 16, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 0.

Sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 16, abstrak yang ada sebanyak 16 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0,pada tahun 2016 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 1, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 1, abstrak yang ada sebanyak 1 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2017 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 1, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 1, abstrak yang ada sebanyak 1 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2018 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 12, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 12, abstrak

DOI: <https://doi.org/10.57249/jbk>

yang ada sebanyak 12 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2019 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 15, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 3.

Abstrak yang ada sebanyak 15 dan jumlah yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2020 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 15, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 14, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 1, abstrak yang ada sebanyak 1 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2021 KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan sebanyak 5, yang masih berlaku berjumlah 5, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 0, abstrak yang ada sebanyak 15 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, jadi keseluruhan jumlah keputusan yang di keluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 1999 sampai tahun 2021 berjumlah 84, jumlah yang masih berlaku 19 jumlah dan yang tidak berlaku 49, Abstrak yang ada 93 dan Abstrak yang tidak ada sebanyak 1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya Program Magang Magang MBKM ini bisa mengetahui kondisi kerja secara langsung di KPU Provinsi Jawa Timur dari sistem yang berjalan hingga proses dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. Sistem yang digunakan pada Sub, bagian Hukum, teknis dan humpas sudah terprogram, yaitu dengan adanya aplikasi Situng, Sidalih, dan Info pemilu yang didapat dari pusat untuk mengelolahan yang berkaitan dengan pemilu. Sedangkan situs JDIH sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik terkait penyediaan produk hukum pada level Kabupaten/Kota, situs JDIH mempermudah mengupload seluruh jenis produk hukum serta mengefektifkan akun medsos JDIH.

Dalam mengakhiri Laporan Program Magang MBKM di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, penulis dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut.

Lebih meningkatkan kinerja agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pemilu mempermudah bagi masyarakat. Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang situs-situs mengenai pemilihan agar masyarakat tidak menjadi golput. Dalam mengecek nama pemilih yang terdaftar atau tidak terdaftar di website Info Pemilu, dalam memasukkan nama sebaiknya hanya menggunakan huruf depan saja dari nama pemilih tersebut, karena nama pemilih yang ada di KK atau KTP sering kali tidak sesuai dengan nama yang ada di website Laporan Praktik Kerja Lapangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Bengkulu Info Pemilu yang mungkin membuat pemilih tersebut tidak terdaftar di TPS tempat asal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Styoro Cahyo Wibowo. (2013). Pengaruh Pelatihan Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Teknisi Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bojonegoro, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4).
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/6260/7112>
- Andriani, P. N., & Setyowati, E. (2016). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58– 67.
- Anjelika Wulan Tamba. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Columbindo Perdana Cabang Manado, *Jurnal Administrasi*
DOI: <https://doi.org/10.57249/jbk>

- Bisnis*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.35797/jab.v7.i001.33-41>
- Aprianngi et al. (2018). Pengaruh Kreativitas, Kedisiplinan, Kompensasi dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan PDAM Kota Padang. *Journal of Economic and Economic Education*, 6(2),143-155. <http://dx.doi.org/10.22202/economica.2018.6.2.2594>
- Ardipandanto, A. (2020). Persiapan KPU dalam Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Info Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-203.
- Aryana, P., & Winoto, H., Tj. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Etika Kerja, dan Loyalitas terhadap Kinerja Karyawan, *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS*, 17(2), 89-110. <http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/IMB/article/view/1528>
- Askiah, A., & Fauzizah, F. (2021). Pengaruh Kreativitas, Motivasi, Disiplin, dan Pelatihan Serta Loyalitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Mahakam Berlian Samjaya. *Change Agent for Management Journal*, 5(1), 45-60. <https://doi.org/10.35915/cj.v5i1.548>
- Din, S. M., Ramli, R., & Bakar, A. A. (2018). A review on trust factors affecting purchase Intention on Instagram. In *2018 IEEE Conference on Application, Information and Network Security (AINS)* (pp. 49–53). IEEE.
- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). 2020. *Daftar Penjualan Mobil Indonesia*. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/01/23/070200815/daftar-mobil-terlaris-di-indonesia-sepanjang-2019?page=all>. Kompas.com
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jazuli, A. (2019). Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 185. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.1.85-200>
- Mulyono, Z. T., & Utami, T. R. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Jurnal Administrative Law & Governance*, 2(4), 733– 743.
- Nim, E., & Province, W. K. (2016). TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
- Nofita Sari, S., & Kartika Sari, F. (2020). Gaya Kepemimpinan Situasional Di Perpustakaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 987. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41098>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkarnain, I. (n.d.). Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten / Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web Provinsi Jambi. 14–30.